

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, A.Z. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

ACCH, Admin. “Reformasi Sistem Penegakan Hukum Dan Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel.” <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/paper/reformasi-sistem-penegakan-hukum-dan-pelayanan-publik-yang-transparan-dan-akuntabel>, 2017.

———. “Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>, 2017.

———. “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.” <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/uu-28-tahun-1999-enyelenggaraan-negara-bersih-dari-kkn>, 2017.

Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisma Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cet. Ke-V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

ACLC, Admin. “Teori-Teori Penyebab Korupsi.” <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi>, 2017.

Adawiyah, Robiatul. “Rekonstruksi Sistem Pidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi.” *Seminar Nasional Hukum*

UNNES Volume 5, no. 1 (2019): hlm. 103-104.

Aditya, Ivan. "Kantor Pertanahan Sleman Targetkan 30 Ribu Bidang." <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/sleman/kantor-pertanahan-sleman-targetkan-30-ribu-bidang/>, 2019.

Adji, Oemar Seno. *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*. Jakarta: Simposium UI, 1966.

Alfian, Listiyono Santoso, Dewi Meyriswati, Ilham Nur. "Korupsi Dan Mentalitas: Kendala Kultural Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* Volume 27, no. 4 (2014): hlm. 183.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Praatama, 1996.

———. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.

Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Alkostar, Artidjo. *Korupsi Politik Di Negara Modern*. Yogyakarta: FH UII Press, 2015.

Andriani, Desi. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul." In *Tesis Pada Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada*, hlm. 11, 147. Yogyakarta: UGM, 2018.

Ansyari, Syahrul. "Menengok Lagi Sejarah Kelahiran KPK." <https://www.vivanews.com/berita/nasional/7146-menengok-lagi-sejarah-kelahiran-kpk?medium=autonext>, 2019.

Aria, Teguh dan. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Aditya Bakti, 2002.

———. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Aditya Bakti, 2005.

———. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Cet. Ke-2. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

———. "Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Masalah Masalah Hukum* Jilid 42, no. 1 (2013): hlm. 24.

———. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2014.

———. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001.

———. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.

Arief, Muladi dan Barda Nawawi. *Penegakan Hukum Pidana*.

Jakarta: Rineka Cipta, 1984.

Arif, Fanni Damara. “Analisis Yuridis Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Program Kerja Tahun 2017-2018 Pada Kantor Pertanahan Kota Medan.” In *Tesis Pada Program Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara*, hlm. 12, 103. Sumatera Utara: USU, 2018.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. Ke-13. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. “Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer.” In *Papper Disampaikan Dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614*. Sumatera Selatan: UNSRI, 2004.

———. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Atmasasmita, Romli. *Globalisasi Dan Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

ATR/BPN, Admin. “Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Menuju Institusi Pertanahan Dan Tata Ruang Berstandar Dunia.” <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/pelaksanaan-reformasi-birokrasi-menuju-institusi-pertanahan-dan-tata-ruang-berstandar-dunia-92201>, 2019.

ATR/BPN, Admin Kementerian. “Pebiayaan PTSL,

Dipublikasikan Pada Laman Instagram Kementerian ATR/BPN Pada Tanggal 10 Oktober 2018.” Instagram kementerian.atrbpn, 2018.

Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jilid III. Jakarta: Media Pratama, 2001.

Barkatullah, Teguh Prasetyo dan Abdul Halim. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Basuki, Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta: Tatanusa, 2001.

Bemmelen, J.M. Van. *Hukum Pidana 1; Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Jakarta: Bina Cipta, 1984.

Bidara, Olden. *Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak Dalam Teori Dan Praktek Pemerintahan, Dalam Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994.

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. USA: West Publishing, 1978.

BPN, Admin. “Kebijakan Kementerian ATR/BPN Dalam Mengimplementasikan Nawacita.” <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/kebijakan-kementerian-atrbpn-dalam-mengimplementasikan-nawacita-60324>, 2015.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Cahaya, Surachmin dan Suhandi. *Strategi & Teknik Korupsi*.

- Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Data.com, Admin. “BPN Bantah Program PTSL Bebas Biaya.” <http://dakta.com/news/11192/bpn-bantah-program-ptsl-bebas-biaya>, 2017.
- Djaja, Ermansyah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Dwisvimiari, Inge. “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum.” *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 11, no. 3 (2011): hlm. 525-530.
- Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Penerbit Alumni, 2004.
- Fadjar, Abdul Mukthie. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Fadlurrohman, Muhammad Dani. “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Di Kabupaten Dompu.” In *Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia*, hlm. 9, 87. Yogyakarta: UII, 2018.
- Faiz, Pan Mohamad. “Teori Keadilan John Rawls.” *Jurnal Konstitusi* Volume 6, no. 1 (2009): hlm. 140-142.

- Fariz, Donal. "Pemerintahan Joko Widodo Dan Serangan Politik Terhadap KPK." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* Volume 5, no. 2 (2019): hlm. 32.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System, A Social Science Perspective*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Garnasih, Yenti. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*. Cet. IV. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hadjon, Philipus Mandiri. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- HAM, Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah c.q. Dirjen Peraturan Perundang-undangan DEPKEH. "Risalah Rapat Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI Dengan Pemerintah c.q. Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKEH HAM Dalam Rangka Pembahasan 5 (Lima) RUU Integrated System." In *Risalah Rapat Panitia Kerja*, hlm. 358. Jakarta, 2004.
- Hamzah, Andi. *Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- . *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Ed. Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

———. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Harahap, Zairin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Harlina, Indah. “Kedudukan, Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penegakan Hukum.” In *Disertasi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, hlm. 70. Jakarta: UI, 2008.

Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

———. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Haryanto, Wawancara dengan. “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi PTSL,” 2020.

———. “Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Dan Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi,” 2020.

———. “Hubungan Faktor Kesempatan Dengan Penyebab Korupsi PTSL,” 2020.

———. “Pemberian Sanksi Pidana Yang Bersifat Primum Remedium Terhadap Tindak Pidana Korupsi PTSL,” 2020.

———. “Sudut Pandang Penerapan AUPB Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi PTSL Yang Besifat Primum Remedium,” 2020.

Hendratno, Edie Toet. “Kebijakan Pemberian Remisi Bagi

Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Ta. Ke-44, no. 4 (2013): hlm. 522.

Hiariej, Edward O.S. “Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi.” In *Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Diucapkan Di Depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada*, hlm. 1-2. Yogyakarta: UGM, 2012.

Hoefnagels, G. Peter. *The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime*. Holland: Kluwer Academic Publisher, 1969.

Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cet. Ke-2. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Informatika, Kementerian Komunikasi dan. “Jadikan Indonesia Mandiri, Berkepribadian, Dan Berdaulat.” <https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5629/NAWACITA%3A+9+Program+Perubahan+Untuk+Indonesia/0/infografis>, 2015.

Irfan, Muhammad Nurul. *Fiqh Jinayah*. Cet. IV. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

———. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Jeremy, Pope. *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

- Jogja, Admin Radar. “Biaya PTSL Tak Saklek Rp 150 Ribu Per Bidang.” <https://radarjogja.co/2018/05/14/biaya-ptsl-tak-saklek-rp-150-ribu-per-bidang/>, 2018.
- Kantaprawira, Rusadi. “Hukum Dan Kekuasaan.” *Makalah Universitas Islam Indonesia*. 1998.
- KKBI, Admin. “Pengertian Kata Ideal.” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ideal>, 2020.
- . “Pengertian Kata Konsep.” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsep>, 2020.
- Kompasiana, Admin. “Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum.” <https://www.kompasiana.com/musri-nauli/5500a387a33311bb74511a73/kesemwrawutan-hukum-indonesia>, 2015.
- . “Reformasi Birokrasi Pemerintahan Desa.” <https://www.kompasiana.com/faizulingga9237/5dc832c5d541df0612751123/reformasi-birokrasi-pemerintahan-des>, 2019.
- Lampung, Admin Tribun. “Diduga Ada Pungli Program PTSL Di Bandar Lampung, Ini Penjelasan BPN.” <https://lampung.tribunnews.com/2019/03/13/diduga-ada-pungli-program-ptsl-di-bandar-lampung-ini-penjelasan-bpn?page=4>, 2019.
- Machmud. *Problematika Penerapan Delik Formal Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia, Fungsionalisasi Asas Ultimum Remedium Sebagai Pengganti Asas Subsidiaritas*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

- Mahadi. *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 2003.
- Mamudji, Hang Rahardjo, Agus Supriyanto, Daly Erni, dan Dian Pudji Simatupang, Sri. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Cet. Ke-1. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. Ke-18. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Marbun, SF. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Marzuki, Peter Makmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- . *Penelitian Hukum*. Cet. Ke-13. Jakarta: Kencana, 2017.
- Masrini, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- MD, Moh. Mahfud. “Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.” In *Bahan Pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” Yang Diselenggarakan Oleh DPP Partai HANURA*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

———. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 2003.

———. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

———. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.

Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan, Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Mujiyanto, Wawancara dengan. “Konsep Ideal Dimasa Mendatang Yang Seharusnya Ditempuh Pemerintah Sebagai Program Anti Korupsi Untuk Mewujudkan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi PTSL,” 2020.

———. “Langkah-Langkah Pencegahan Tindak Pidana Korupsi PTSL Sebagai Wujud Fraud Control Plan Di Masa Mendatang,” 2020.

———. “Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi PTSL,” 2020.

Muktiono, Irfan. “KKN: Identifikasi Dan Strategi.” *Makalah Badan Diklat Depdagri Pada Orientasi Good Governance: Sekretaris Dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota*. 2001.

- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Cet. Ke-3. Bandung: Alumni, 2005.
- Muladi, Barda Nawawi Arief dan. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Mulyadi, Mahmud. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- . “Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy.” *Jurnal Legislasi* Volume 8, no. 1 (2011): hlm. 236.
- Mulyosudarmo, Suwoto. *Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik Dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*. Jakarta: Universitas Airlangga, 1990.
- Nasional, Badan Pembinaan Hukum. *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: BPHN Depkum HAM, 2007.
- Poerdarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Prihatin, Dodik. “Urgensi Non Penal Policy Sebagai Politik Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi.” In *Https://Repository.Unej.Ac.Id/Handle/123456789/62977*, hlm. 11., 2015.
- Priyatmo, Wawancara dengan Wahyu. “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi PTSL,”

2020.

———. “Langkah-Langkah Pencegahan Tindak Pidana Korupsi PTSL Sebagai Wujud Fraud Control Plan Di Masa Mendatang,” 2020.

———. “Perubahan Subtansi Peraturan Yang Seharusnya Di Lakukan Agar Sesuai Dengan Konsep Ideal Sebagai Wujud Program Anti Korupsi Di Masa Mendatang,” 2020.

Purbopranoto, Kuntjoro. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara*. Bandung: Bina Cipta, 1975.

Purwoleksono, Laode M. Syarif dan Didik E. *Hukum Anti Korupsi*. USAID: Kemitraan dan Asia Foundation, n.d.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Edited by Awaludin Marwan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.

Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rasul, Sjahruddin. “Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja Dalam Pemberantasan Korupsi.” *Jurnal Pro Justisia* Volume 26, no. 1 (2008): hlm. 65.

Rato, Dosminikus. *Filosafat Hukum Mencari Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Presindo, 2010.

Rawls, John. A. *Theory of Justice: Teori Keadilan*. London: Oxford University, 1973.

Reksodiputra, Mardjono. *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan Dan Pengendalian Hukum*. Jakarta: Lembaga

Kriminologi UI, 1995.

Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.

Rewansyah, Asmawi. *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance: Dikutip Dari AR Mustopadidjaja, Dimensi-Dimensi Pokok Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Cetakan Kelima, Duta Pertiwi Foundation, Jakarta, 2005*. Jakarta: Yusaintanas Prima, 2010.

———. *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*. Jakarta: Yusaintanas Prima, 2010.

RI, Direktori Putusan Mahkamah Agung. “PTSL.”
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, 2019.

RI, Rapat Paripurna DPR. “Fraksi PDIP, FKP, FPP Dan FABRI Menyetujui Konsep AUPB Beserta Rumusan Penjelasannya.” Jakarta, 1999.

Ridwan. “Peran Lembaga Pendidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 12, no. 3 (2012): hlm. 555.

Ristiyanto, Novia Tri Kurniasari dan Anna Fariyanti dan Nirwan. “Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Menggunakan Analytical Hierarchy Process.” *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah* Volume 10 (2018): hlm. 24.

Rohim. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pena Multi Media, 2008.

- Rohmatillah, Maqhfirotur. "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi PTSL Di Kabupaten Situbondo." In *Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 7, 180. Yogyakarta, 2019.
- Sahprada, Karina Gita. "Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Bandar Lampung." In *Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung*, hlm. 6, 81. Lampung: UNILA, 2018.
- Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. "Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Ta. Ke-47, no. 4 (2017): hlm. 460.
- Santosa, Pandji. *Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi Good Governance*. Jakarta: Revlika Aditama, 2008.
- Schilder, J.G. Brouwer dan. *A Survey of Dutch Administrative Law*. Nijmegen: Ars Aequilibrari, 1998.
- Setiabudi, Arief. "Peran Tim Saber Pungli Polda Lampung Dalam Operasi Tangkap Tangan Terhadap Pelaku Pungli Program PTSL." In *Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung*, 7, 74, 2019.
- Setiadi, Wicipto. "KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)." *Jurnal Legislasi* Volume 15, no. 3 (2018): hlm. 261.
- Setiardja, A. Gunawan. *Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta:

Kanisius, 1990.

Sidharta. *Reformasi Peradilan Dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010.

Sinaga, Japansen. “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pendekatan Non Penal Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Korban.” Universitas Sumatera Utara, 2016.

Sinamo, Nomensen. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.

Singkawang, Admin Tribun. “BPN Singkawang Beberkan Biaya Buat Sertifikat PTSL.”
<https://pontianak.tribunnews.com/2018/08/19/bpn-singkawang-beberkan-biaya-buat-sertifikat-ptsl>, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*. Cet Ke-V. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

———. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Subarjo, Wawancara dengan. “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi PTSL,” 2020.

———. “Langkah-Langkah Pencegahan Tindak Pidana Korupsi PTSL Sebagai Wujud Fraud Control Plan Di Masa Mendatang,” 2020.

- . “Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi PTSL,” 2020.
- . “Perubahan Subtansi Peraturan Yang Seharusnya Di Lakukan Agar Sesuai Dengan Konsep Ideal Sebagai Wujud Program Anti Korupsi Di Masa Mendatang,” 2020.
- Sudrajat, Subana dan. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Supaya, Wawancara dengan. “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi PTSL,” 2020.
- . “Hubungan Faktor Kesempatan Dengan Penyebab Korupsi PTSL,” 2020.
- . “Konsep Ideal Dimasa Mendatang Yang Seharusnya Ditempuh Pemerintah Sebagai Program Anti Korupsi Untuk Mewujudkan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi PTSL,” 2020.
- . “Langkah-Langkah Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional,” 2020.
- . “Langkah-Langkah Pencegahan Tindak Pidana Korupsi PTSL Sebagai Wujud Fraud Control Plan Di Masa Mendatang,” 2020.
- . “Pemberian Sanksi Pidana Yang Bersifat Primum Remedium Terhadap Tindak Pidana Korupsi PTSL,” 2020.
- . “Perubahan Subtansi Peraturan Yang Seharusnya Di

Lakukan Agar Sesuai Dengan Konsep Ideal Sebagai Wujud Program Anti Korupsi Di Masa Mendatang,” 2020.

———. “Sudut Pandang Penerapan AUPB Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi PTSL, Dan Pelayanan Pendaftaran Tanah,” 2020.

Surabaya, Admin Kontras. “Posko Pengaduan Pungutan Liar Pendaftaran Tanah Sistematis Dan Lengkap (PTSL).” <https://kontrassurabaya.org/siaran-pers/posko-pengaduan-pungutan-liar-pendaftaran-tanah-sistematis-dan-lengkap-pts1/>, 2019.

Suradi. *Korupsi Dalam Sektor Pemerintahan Dan Swasta*. Yogyakarta: Gava Media, 2006.

Susanto, Nur Agus. “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus ‘ST’ Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012.” *Jurnal Yudisial* Volume 7, no. 3 (2014): hlm. 217-229.

Susanto, Otje Salman dan Anton F. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama, 2004.

Suwitri, Sri. “PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi.” *Jurnal Dialogue* Volume 4, no. 1 (2007): hlm. 38-39.

Syafrudin, Ateng. “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab.” *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV (2000): hlm. 22.

Tanya, Bernard L. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta

Publising, 2013.

Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Triwiwijaya, Yaris Adhial Fajrin dan Ach. Faisol.
“Pencegahan Korupsi Pasca Putusan MK Nomor 71/PUU/XIV/2016 Melalui Pendekatan Kebijakan.”
Jurnal HUMANI Volume 9, no. 1 (2019): hlm. 55.

Utomo, Wahyu. “Fraud Control Plan : Sebuah Solusi.”
Paraiatte Volume 1, no. 3 (2008): hlm. 6-7.

Wahjono, Padmo. *Pembangunan Hukum Di Indonesia*.
Jakarta: Ind Hill Co, 1989.

Waluyo, Bambang. “Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Yuridis* Volume 1, no. 2 (2014): hlm. 175-176.

Wantu, Fence M. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata.” *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 12, no. 3 (2012): hlm. 482-488.

Wibawa, Arya Fauzy F.M., dan Ainun Habibah, Samodra.
“Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar Di Jembatan Timbang.” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Volume 12, no. 2 (2013): hlm. 75.

Wibowo, Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., Indah Sri Utari, Yusuf Kurniadi, Asriana Issa Sofia, Agus Mulya Karsona, Gandjar Laksmana Bonaprapta, dan Romie O. Bura, Aryo P. *Bab 07, Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jakarta:

- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 2010.
- Wicaksono, Muhammad Fatahillah Akbar and Dian Agung. "The Reform Of Corruption Eradication In Indonesia: The Prismatic Law In The Recent Context." *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 25, no. 1 (2013): hlm. 179.
- Wigyosubroto, Sutandyo. *Hukum, Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam, 2002.
- Winarnno, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Wirawan, Vani. "Penerapan E-Government Dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer Di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* Volume 1, no. 1 (2020): hlm. 11.
- Wojowasito, S. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1999.
- Zoelva, Hamdan. *Pemakzulan Presiden Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Zuhaili, Wahbah Az. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Edisi II. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2003.